

Katalog: 3205005.35

# Profil Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**



# Profil Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2023

<https://jatim.bps.go.id>

## **PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2023**

No. Publikasi : 35000.24008

Katalog BPS : 3205005.35

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv+75 halaman

Naskah : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar Kulit : BPS Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Jawa Timur

Sumber Ilustrasi : BPS Provinsi Jawa Timur, *pexels.com*

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

**TIM PENYUSUN**

**PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2023**

Pengarah:  
Zulkipli

Penanggung Jawab:  
M. Suharsa

Penyunting:  
Abdus Salam

Penulis Naskah:  
Nizar Irsyad

Pengolah Data:  
Nizar Irsyad

Penata Letak:  
Nizar Irsyad



## KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi hampir di seluruh negara. Kemiskinan menjadi topik perbincangan sehari-hari baik di media massa, dunia akademis, maupun pemerintahan. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Publikasi “Profil Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2023” menyajikan metodologi dan analisis deskriptif yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan Indonesia tahun 2023. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Publikasi ini dapat terealisasi berkat kerja sama berbagai pihak mulai dari petugas pengumpul data di lapangan hingga penulis. Kami ucapkan penghargaan tinggi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi.

Surabaya, Maret 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Timur



**Zulkipli**



**DAFTAR ISI**  
**PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang .....	3
Tujuan Penulisan.....	5
Ruang Lingkup.....	5
Sistematika Penulisan .....	5
BAB 2 METODOLOGI.....	7
Definisi Kemiskinan .....	9
Kemiskinan Absolut .....	10
Kemiskinan Relatif.....	11
Kriteria Kemiskinan.....	13
Pendekatan Kebutuhan Dasar.....	13
Pendekatan Multidimensi .....	22
Penjelasan Teknis.....	23
Sumber Data.....	27
BAB 3 KONDISI KEMISKINAN JAWA TIMUR .....	29

Perkembangan Penduduk Miskin Jawa Timur, 2018 – 2023 .....	31
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Jawa Timur, 2018 – 2023.....	33
Perkembangan Gini Ratio Jawa Timur, 2018-2023 .....	35
<b>BAB 4 KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN</b>	
<b>JAWA TIMUR .....</b>	<b>37</b>
Karakteristik Demografi Penduduk Miskin Jawa Timur 2023 .....	39
Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Jawa Timur 2023 .....	48
Karakteristik Kesehatan Penduduk Miskin Jawa Timur 2023 .....	53
Karakteristik Perumahan Penduduk Miskin Jawa Timur 2023 .....	59
Akses terhadap Jaminan Sosial Penduduk Miskin Jawa Timur 2023.....	68
Karakteristik Konsumsi Rumah Tangga Miskin Jawa Timur 2023.....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah .....	40
Tabel 2. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kelompok Usia dan Wilayah.....	41
Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Status Perkawinan dan Wilayah .....	42
Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kepemilikan NIK dan Wilayah .....	43
Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Usia dan Kepemilikan Akta Kelahiran .....	44
Tabel 6. Persentase Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status Pekerjaan.....	45
Tabel 7. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama dan Wilayah.....	46
Tabel 8. Persentase Penduduk Miskin Usia > 5 Tahun Berdasarkan Kemampuan Baca-Tulis Huruf Latin dan Wilayah.....	49
Tabel 9. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur .....	50
Tabel 10. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Ijazah Tertinggi dan Wilayah.....	51

Tabel 11. Persentase Penduduk Miskin Usia > 5 Tahun Menurut Ijazah Tertinggi dan Wilayah .....	52
Tabel 12. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Keluhan Kesehatan dan Wilayah.....	54
Tabel 13. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Pengobatan Keluhan Kesehatan dan Wilayah .....	55
Tabel 14. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Alasan Tidak Berobat Jalan dan Wilayah.....	56
Tabel 15. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Wilayah.....	57
Tabel 16. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Tempat Melahirkan Anak Terakhir dan Wilayah .....	57
Tabel 17. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Penggunaan Alat KB/cara Tradisional dan Wilayah .....	58
Tabel 18. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Wilayah	60
Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Fasilitas Tempat BAB, Pengguna, dan Wilayah.....	61
Tabel 20. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Wilayah.....	62
Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Air Minum dan Wilayah .....	64

Tabel 22. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Air untuk Memasak/Mandi/Cuci dan Wilayah .....	65
Tabel 23. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Penerangan dan Wilayah .....	66
Tabel 24. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Wilayah.....	67
Tabel 25. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Wilayah .....	69
Tabel 26. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Wilayah .....	70
Tabel 27. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Program PBI dan Wilayah.....	71
Tabel 28. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Program PBI dan Wilayah.....	72
Tabel 29. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan, Rata-rata Konsumsi Kalori, dan Rata-rata Konsumsi Protein .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur, 2018 – 2023 .....	32
Gambar 2. Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Timur, 2018 – 2023 .....	34
Gambar 3. Perkembangan Gini Ratio Jawa Timur, 2018 – 2023 .....	36



## BAB 1

# PENDAHULUAN

---





## 1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi hampir diseluruh negara. Kemiskinan menjadi topik perbincangan sehari-hari baik di media massa, dunia akademis, maupun dalam pemerintahan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (BPS, 2014).

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana dalam Undang-undang Dasar 1945 tersurat tentang memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanggulangan kemiskinan juga telah dimulai sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Setiap masa kepemimpinan memiliki program-program penanggulangan yang berbeda-beda.

Mulai era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan. Selanjutnya pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, prioritas penanggulangan kemiskinan semakin ditingkatkan dengan menerbitkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya Perpres tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden yaitu menurunkan angka

kemiskinan sampai dengan 8-10 persen pada akhir tahun 2014. Pada era Kabinet Kerja sekarang ini, penanggulangan kemiskinan masih tetap dilanjutkan sebagai prioritas utama pembangunan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan Penanggulangan Kemiskinan maka dibutuhkan data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang baik akan dapat digunakan mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

## **2. Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga dan penduduk miskin Provinsi Jawa Timur berdasarkan:

- a. Karakteristik Kependudukan
- b. Karakteristik Pendidikan
- c. Karakteristik Kesehatan
- d. Karakteristik Perumahan
- e. Akses terhadap Jaminan Sosial
- f. Akses terhadap Fasilitas Keuangan

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023.

## **4. Sistematika Penulisan**

- Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.
- Bab II menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk penulisan publikasi ini.
- Bab III membahas tentang kondisi dan perkembangan penduduk miskin provinsi Jawa Timur tahun 2023.

- Bab IV membahas tentang karakteristik penduduk miskin provinsi Jawa Timur tahun 2023.

<https://jatim.bps.go.id>

## BAB 2

# METODOLOGI

---





## 1. Definisi Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan berdasarkan penyebabnya dan kemiskinan secara konseptual. Kemiskinan berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan.

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dasar perbedaan kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif terletak pada standar penilaian. Standar penilaian kemiskinan absolut merupakan suatu ukuran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Ukuran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut

sebagai garis kemiskinan. Sedangkan standar penilaian kemiskinan relatif merupakan ukuran yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat local serta mereka yang berada dibawah ukuran penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif.

### **1.1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar minimum baik makanan maupun non makanan yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Definisi mengenai standar hidup minimum merupakan dasar pembentukan garis kemiskinan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan dasar minimum tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Membandingkan angka kemiskinan antar negara diperlukan garis kemiskinan absolut yang sama diantara negara-negara tersebut. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan absolut untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini

bermanfaat untuk menentukan kemana sumber daya finansial (dana) yang ada akan disalurkan, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP (*purchasing power parity*) US\$ perkapita perhari. Nilai tukar yang digunakan di dalam penghitungan garis kemiskinan 1 PPP US\$ adalah nilai tukar dolar PPP. Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang disuatu negara, dalam hal ini US\$, untuk membeli barang dan jasa yang “sama” di suatu negara lain.

Saat ini ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia adalah: a) PPP US \$ 1,25 perkapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,38 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) PPP US \$ 2 perkapita perhari, yaitu sekitar 2,09 miliar penduduk yang hidup dibawah ukuran tersebut.

## **1.2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dikarenakan kebijakan pembangunan yang tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Kelompok penduduk

relatif miskin bisa dikategorikan misal 17 persen, 25 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran.

Menurut Ravallion (1998) negara kaya mempunyai garis kemiskinan yang relatif lebih tinggi daripada negara miskin. Dalam papernya yang berjudul *Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study*, menjelaskan mengapa angka kemiskinan resmi di Amerika Serikat (negara maju) pada tahun 1990-an awal sebesar 15 persen hampir sama dengan angka kemiskinan di Indonesia (negara berkembang) yang juga mendekati 15 persen. Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Ketika negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita dibawah 50 persen dari median/rata-rata pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relative juga meningkat. Namun hal ini tidak berlaku untuk negara Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade.

Kemiskinan relatif secara konsep dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin. Namun untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan antar waktu tidak bisa menggunakan konsep kemiskinan relatif, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

## **2. Kriteria Kemiskinan**

### **2.1. Pendekatan Kebutuhan Dasar**

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Data yang digunakan untuk menyusun komponen kebutuhan dasar tersebut berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Batas ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran inilah yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Sedangkan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

### 2.1.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

Teknik penghitungan GKM:

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada

diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

GKM<sub>j</sub> = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilo- kalori).

- $P_{jk}$  = Harga komoditi k di daerah j.  
 $Q_{jk}$  = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.  
 $V_{jk}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.  
 $j$  = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM<sub>j</sub> tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\frac{HK_j}{2100} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Dimana :

- $K_{jk}$  = Kalori dari komoditi k di daerah j  
 $HK_j$  = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Dimana :

$F_j$  = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilo kalori/kapita/hari.

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi.

Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Dimana:

- NF<sub>p</sub> = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).
- V<sub>i</sub> = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
- R<sub>i</sub> = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).
- i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.
- p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

### 2.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

$z =$  Garis Kemiskinan.

$y_i =$  Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  
 $y_i < z$

$q =$  Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n =$  jumlah penduduk.

### 2.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

$z =$  Garis Kemiskinan.

$y_i =$  Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  
 $y_i < z$

$q =$  Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n =$  jumlah penduduk.

#### 2.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

$z =$  Garis Kemiskinan.

$y_i =$  Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  
 $y_i < z$

$q =$  Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n =$  jumlah penduduk.

## 2.2. Pendekatan Multidimensi

Selain menggunakan pendekatan kebutuhan dasar pengukuran kemiskinan saat ini telah dikembangkan dengan pendekatan multidimensi atau yang biasa disebut *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Pendekatan ini telah diinisiasi oleh *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) sejak tahun 2010.

Berbeda dengan metode pengukuran kemiskinan yang selama ini berbasis pendapatan atau konsumsi. MPI melihat struktur kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Konsep ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Amartya Sen, yang menyebutkan bahwa kemiskinan itu harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi (Sen, 1981; Sen, 2000).

MPI meliputi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Ada sepuluh indikator dalam mengukur kemiskinan yaitu 1) gizi, 2) kematian bayi, 3) lama sekolah, 4) kehadiran dalam pendidikan, 5) bahan bakar untuk memasak, 6)

sanitasi, 7) air bersih, 8) sumber penerangan, 9) kondisi lantai rumah, dan 10) kepemilikan aset. Semua indikator dan dimensi dijumlahkan, lalu dicari rata-rata nilai. Seseorang dikatakan miskin ketika total rata-rata penilaian kecil dari 1/3. MPI adalah perkalian antara multidimensional headcount ratio (H) dengan intensity of poverty (A).

Indikator yang ditetapkan dalam MPI merupakan cakupan dari tujuan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Bagi UNDP menjadi lebih holistik dalam melihat dimensi kemiskinan yang terus mengalami pergeseran akibat perubahan struktur pembangunan secara global. Dan menjadi dasar dalam strategi penanggulangan kemiskinan secara global.

### 3. Penjelasan Teknis

- a. **Rumah tangga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
- b. **Rumah tangga miskin** adalah rumah tangga yang pengeluaran per kapitanya dibawah garis kemiskinan.
- c. **Anggota rumah tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga pada waktu pencacahan maupun

sementara tidak ada. ART yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, dan anggotarumah tangga yang bepergian belum sampai 6 bulan namun dengan maksud pergi lebih dari 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga lagi. Sebaliknya orang yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih, atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

- d. **Kepala rumah tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga
- e. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- f. **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- g. **Umur** dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi.
- h. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan

melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

- i. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.
- j. **Sekolah** adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar (SD dan SLTP), menengah (SLTA) dan tinggi (perguruan tinggi/akademi), termasuk pendidikan yang setara seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Madrasah Diniyah bukan merupakan sekolah formal.
- k. **Beras Sejahtera (Rastra)** adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa program pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin.
- l. **Program Indonesia Pintar (PIP)** adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. PIP

melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

- m. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu keluarga Sejahtera (KKS)** adalah adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013.
- n. **Program Keluarga Harapan (PKH)** adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/ menyusui, anak balita atau anak usia 5-18 tahun yang belum tamat pendidikan dasar, dan ART lanjut usia serta disabilitas berat. Keluarga PKH akan menerima bantuan bila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat bagi anak dan ibu hamil, serta merawat ART lanjut usia dan disabilitas berat.
- o. **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)** adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM menerima kit bantuan nontunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran BPNT adalah Rp.200.000,00 per

KPM per bulan dan tidak dapat diambil tunai, dimana apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warung.

#### **4. Sumber Data**

Publikasi ini disusun menggunakan data Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 - 2018 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018.



BAB 3

KONDISI KEMISKINAN

JAWA TIMUR

---





## **1. Perkembangan Penduduk Miskin Jawa Timur, 2018 – 2023**

Indikator kemiskinan dapat diketahui dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Jika dilihat berdasarkan dua indikator tersebut perkembangan penduduk miskin di Jawa Timur selama enam tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dimana terjadi penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan Maret tahun 2018 sejumlah 4,333 juta jiwa kemudian menurun menjadi 4,189 juta jiwa pada bulan Maret tahun 2023. Hal ini berarti dalam jangka waktu lima tahun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara absolut sebesar 0,144 juta jiwa.

**Gambar 1.**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Jawa Timur, 2018 – 2023**



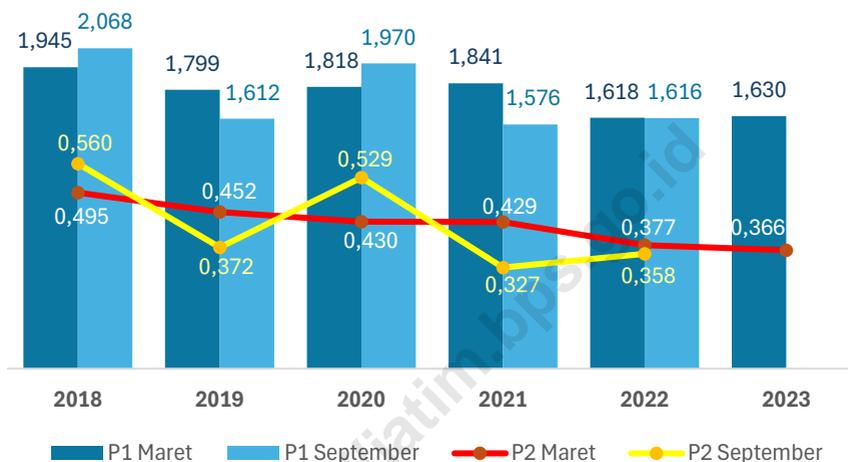
Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin di Jawa Timur juga mengalami perkembangan yang positif dimana terjadi penurunan persentase sebesar 0,63 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada bulan maret tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 10,98 persen dan pada bulan Maret tahun 2023 menurun menjadi sebesar 10,35 persen.

Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini disebabkan karena memang tingkat kemiskinan sudah mendekati batasan *hard core poverty* (kemiskinan kronis). Batasan *hard core poverty* atau kemiskinan kronis berada pada kisaran 10 persen. Kemiskinan kronis merupakan suatu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian, rendahnya pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

## **2. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Jawa Timur, 2018 – 2023**

Permasalahan kemiskinan bukan hanya pada jumlah penduduk miskin dan persentasenya. Ada permasalahan lain yang juga perlu kita perhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Gambar 2.**  
**Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks**  
**Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Timur, 2018 – 2023**



Kondisi penduduk miskin di Jawa Timur antara tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.2. Ada kecenderungan penurunan indeks kedalaman kemiskinan selama lima tahun terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada bulan Maret tahun 2018 sebesar 1,945 turun menjadi 1,630 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,315.

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, untuk melihat kondisi penduduk miskin lebih mendalam dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran

pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kearifan Kemiskinan di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks Kearifan Kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun mengalami penurunan yaitu sebesar 0,129. Pada bulan Maret tahun 2018 sebesar 0,495 kemudian pada bulan Maret tahun 2023 naik menjadi 0,366.

### **3. Perkembangan Gini Ratio Jawa Timur, 2018 – 2023**

Salah satu ukuran untuk mengetahui ketimpangan adalah dengan menggunakan Gini Ratio. Gini Ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 – 1, semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

**Gambar 3.**  
**Perkembangan Gini Ratio Jawa Timur, 2018 – 2023**



Perkembangan Gini Ratio di Jawa Timur selama lima tahun terakhir mengalami cenderung mengalami penurunan akan tetapi meningkat pada tahun 2023. Pada bulan Maret tahun 2018 Gini Ratio di Jawa Timur sebesar 0,379 dan semakin menurun menjadi 0,371 pada bulan Maret tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,387 pada bulan Maret 2023. Kenaikan Gini Ratio sebesar 0,016 ini merupakan suatu indikasi adanya ketimpangan yang semakin melebar dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

## BAB 4

# KARAKTERISTIK PENDUDUK MISKIN JAWA TIMUR

---





## 1. Karakteristik Demografi Penduduk Miskin Jawa Timur 2023

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 4,189 juta jiwa atau sebesar 10,09 persen. Besaran penduduk miskin yang mendekati angka 10 persen atau mendekati batasan kemiskinan kronis merupakan suatu tantangan tersendiri bagi *stakeholder* di Jawa Timur untuk bisa menurunkan lebih kecil lagi. Usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat yang lebih baik perlu dukungan kebijakan yang tepat. Untuk menyusun kebijakan yang tepat diperlukan dukungan data yang akurat dan mendetil terkait penduduk miskin. Untuk itu perlu dilakukan telaah data penduduk miskin secara lebih mendalam terkait karakteristik penduduk miskin tersebut.

Karakteristik penduduk miskin yang perlu diperhatikan yaitu terkait masalah demografi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Karakteristik demografi penduduk miskin yang perlu ditelaah lebih mendalam meliputi jenis kelamin kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, status perkawinan kepala rumah tangga, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran anak, dan bidang pekerjaan utama.

Kepala rumah tangga (KRT) menurut konsep Susenas adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab

atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Persentase kepala rumah tangga miskin di perkotaan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan persentase kepala rumah tangga miskin berjenis kelamin laki-laki di pedesaan. Sebaliknya, rumah tangga miskin di pedesaan persentase kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan persentase rumah tangga miskin berjenis kelamin perempuan di perkotaan.

**Tabel 1. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah**

KRT	Jenis Kelamin (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Perkotaan	87,98	12,02	100,00
Perdesaan	87,69	12,31	100,00
Perkotaan+Perdesaan	87,81	12,19	100,00

Berdasarkan kelompok usia kepala rumah tangga miskin dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu kelompok kepala rumah tangga berusia kurang dari 30 tahun, kelompok kepala rumah tangga berusia 30 sampai 44 tahun, kelompok kepala rumah tangga berusia 45 sampai 59 tahun, dan kelompok kepala rumah tangga berusia di atas 60 tahun.

**Tabel 2. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kelompok Usia dan Wilayah**

KRT	Kelompok Usia (%)				
	<30	30-44	45-59	60+	Total
Perkotaan	3,36	27,96	33,99	34,69	100,00
Perdesaan	4,39	27,34	32,35	35,91	100,00
Perkotaan + Perdesaan	3,97	27,59	33,02	35,41	100,00

Jika dilihat dari kelompok usia kepala rumah tangga miskin ini nampak bahwa untuk kelompok usia diatas 60 tahun cukup besar yaitu sebesar 35,41 persen. Jika diperdalam lagi kelompok usia kepala rumah tangga penduduk miskin yang berusia 60+ di perdesaan lebih tinggi yaitu 35,91 persen dari pada kelompok usia kepala rumah tangga penduduk miskin yang berusia 60+ di perkotaan yaitu 34,69 persen. Angka sebesar ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan kemiskinan, dimana pada kelompok usia ini mulai memasuki masa tidak produktif.

**Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Status Perkawinan dan Wilayah**

KRT	Status Perkawinan (%)				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
Perkotaan	1,31	84,46	1,77	12,47	100,00
Perdesaan	0,40	86,74	1,77	11,09	100,00
Perkotaan + Perdesaan	0,77	85,81	1,77	11,65	100,00

Status perkawinan kepala rumah tangga penduduk miskin di Jawa Timur kondisinya juga beragam, dimana secara urutan yang terbanyak dapat diketahui bahwa kepala rumah tangga penduduk miskin yang berstatus kawin merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 85,81 persen. Kemudian kepala rumah tangga penduduk miskin dengan status cerai mati merupakan tertinggi kedua yaitu sebesar 11,65 persen. Tertinggi ketiga yaitu kepala rumah tangga yang berstatus cerai hidup dengan besaran 1,77 persen. Terakhir adalah kepala rumah tangga dengan status belum kawin sebesar 0,77 persen.

Status perkawinan kepala rumah tangga penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan memiliki karakteristik yang mirip namun masih ada perbedaan. Perbedaan tersebut adalah kepala rumah tangga penduduk miskin di perkotaan yang berstatus belum kawin dan cerai mati lebih besar dibandingkan kepala rumah

tangga penduduk miskin di perdesaan. Sedangkan kepala rumah tangga penduduk miskin dengan status kawin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan kepala rumah tangga penduduk miskin di perkotaan.

**Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kepemilikan NIK dan Wilayah**

ART	Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	98,72	1,28	100,00
Perdesaan	97,51	2,49	100,00
Perkotaan + Perdesaan	98,00	2,00	100,00

Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa, NIK akan dikenakan pada setiap orang ketika terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dan NIK itu tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia.

Nomor Induk Kependudukan dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi, Jadi, NIK adalah dokumen identitas diri yang digunakan sebagai dasar untuk pelayanan publik saat ini maupun masa depan. Jika dilihat dari data SUSENAS Maret 2023 penduduk miskin Jawa Timur yang tidak memiliki NIK sebesar 2,00 persen, dimana persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak yang tidak memiliki NIK dibandingkan penduduk miskin di perkotaan.

**Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Usia dan Kepemilikan Akta Kelahiran**

Usia (Tahun)	Kepemilikan Akta Kelahiran (%)		
	Ya	Tidak	Total
0	62,74	37,26	100,00
1-4	82,64	17,36	100,00
5-6	92,87	7,13	100,00
7-12	92,97	7,03	100,00
13-17	87,94	12,06	100,00
Total (0 – 17)	87,39	12,61	100,00

Selain NIK, dokumen administrasi kependudukan yang tidak kalah penting adalah akta kelahiran. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak tercatat dalam kependudukan, tidak punya posisi hukum, tidak punya hak dasar dan tidak punya status kewarganegaraan. Jika dilihat pada tabel 4.5 penduduk miskin yang berusia di bawah 18 tahun di Jawa Timur yang tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 12,61 persen. Angka tersebut -merupakan angka yang cukup besar dan ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah dalam menuntaskan masalah administrasi kependudukan terutama pada penduduk miskin.

**Tabel 6. Persentase Penduduk dan Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status Pekerjaan**

ART/RT	Status Pekerjaan (%)			
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	Total
Penduduk miskin usia $\geq$ 15 tahun	38,75	45,72	15,53	100,00
Kepala rumah tangga miskin	10,88	67,55	21,57	100,00

Tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur salah satunya disebabkan oleh masih banyak penduduk miskin atau rumah tangga miskin yang tidak bekerja. Penduduk miskin usia  $\geq$  15 tahun yang tidak memiliki pekerjaan sebesar 38,75 persen. Demikian pula kepala rumah tangga miskin yang tidak memiliki pekerjaan

juga relatif masih tinggi yaitu sebesar 10,88 persen. Penduduk miskin yang memiliki pekerjaan sebagian besar masuk pada pekerjaan sektor informal dimana rata-rata jaminan akan kesejahteraannya kurang begitu bagus. Penduduk miskin usia  $\geq 15$  tahun yang bekerja pada sektor informal di Jawa Timur mencapai 45,72 persen. Sedangkan, kepala rumah tangga miskin yang bekerja pada sektor informal di Jawa Timur mencapai 67,55 persen.

**Tabel 7. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Lapangan Usaha/Bidang Pekerjaan Utama dan Wilayah**

KRT	Lapangan Usaha / Bidang Pekerjaan Utama (%)							
	A	C	F	G	H	I	S	Lainnya
Perkotaan	43,24	13,38	9,20	14,05	2,56	5,24	6,71	5,61
Perdesaan	67,44	5,97	6,90	7,73	1,46	2,19	3,86	4,46
Perkotaan + Perdesaan	58,15	8,81	7,78	10,16	1,88	3,36	4,95	4,90

**Keterangan**

- |   |  |
|---|--|
| A : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan   | H : Pengangkutan dan Pergudangan         |
| C : Industri Pengolahan   | I : Penyediaan akomodasi dan makan minum |
| F : Konstruksi  | S : Aktivitas Jasa Lainnya               |
| G : Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor |  |

Bidang pekerjaan penduduk miskin di Jawa Timur cukup beragam, mulai dari pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa, dan lain-lain.

Namun yang paling dominan adalah penduduk miskin yang bekerja pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 58,15 persen. Bidang yang lain yang persentasenya besar adalah bidang perdagangan dan industri pengolahan yaitu masing-masing sebesar 10,16 persen dan 8,81 persen.

Kondisi bidang pekerjaan penduduk miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Komposisi penduduk miskin pada wilayah perkotaan yang bekerja dibidang pertanian, kehutanan, dan perikanan persentasenya paling besar yaitu sebesar 43,24 persen. Kemudian porsi terbesar kedua yaitu penduduk miskin yang bekerja di bidang industri pengolahan sebesar 13,38 persen. Porsi terbesar ketiga yaitu penduduk miskin yang bekerja dibidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 14,05 persen.

Sedangkan untuk wilayah perdesaan komposisi penduduk miskin berbeda dengan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perdesaan komposisi penduduk miskin yang bekerja dibidang pertanian, kehutanan, dan perikanan persentasenya paling besar yaitu sebesar 67,44 persen. Kemudian porsi terbesar kedua yaitu penduduk miskin yang bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yaitu

sebesar 7,73 persen. Porsi terbesar ketiga yaitu penduduk miskin yang bekerja dibidang konstruksi sebesar 6,90 persen.

## **2. Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Jawa Timur 2023**

Kemampuan literasi baca-tulis merupakan suatu kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia dari jaman dahulu. Literasi baca-tulis dipahami sebagai kemampuan berkomunikasi sosial di dalam masyarakat. Disinilah literasi baca-tulis sering dianggap sebagai kemahiran berwacana. Literasi baca-tulis terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi bermacam-macam persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan hal tersebut merupakan bagian dari hak dasar manusia yang menyangkut pembelajaran sepanjang hayat ([www.literasipublik.com/literasi-baca-tulis](http://www.literasipublik.com/literasi-baca-tulis)).

**Tabel 8. Persentase Penduduk Miskin Usia > 5 Tahun Berdasarkan Kemampuan Baca-Tulis Huruf Latin dan Wilayah**

ART	Baca Tulis Huruf Latin/Alfabet (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	89,63	10,37	100,00
Perdesaan	83,25	16,75	100,00
Perkotaan + Perdesaan	85,85	14,15	100,00

Kemampuan literasi baca-tulis penduduk miskin di Jawa Timur masih cukup memprihatinkan dimana masih ada 14,15 persen penduduk miskin yang tidak bisa baca-tulis huruf latin. Jika dilihat kemampuan literasi baca-tulis perwilayah, maka penduduk miskin wilayah perkotaan lebih baik dibandingkan wilayah perdesaan, dimana penduduk miskin yang bisa baca-tulis sebesar 89,63 persen diwilayah perkotaan berbanding 83,25 persen untuk wilayah perdesaan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini sebab memiliki manfaat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Penduduk miskin memiliki karakteristik tersendiri terkait pendidikan, baik dilihat dari pendidikan kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga.

**Tabel 9. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur**

ART	Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur (Tahun)			
	7-12	13-15	16-18	19-24
Angka Partisipasi Sekolah (%)	99,05	94,92	65,74	13,91

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023 angka partisipasi sekolah penduduk miskin di Jawa Timur menunjukkan adanya penurunan yang cukup banyak untuk golongan usia yang lebih dewasa. Angka partisipasi sekolah penduduk miskin di kelompok umur 7-12 tahun masih sangat tinggi, mencapai 99,05 persen. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk miskin sedikit lebih rendah pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,92 persen. Angka tersebut semakin rendah pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 65,74 persen. Penduduk miskin pada kelompok umur 19-24 merupakan penduduk miskin dengan angka partisipasi sekolah terendah sebesar 13,91 persen.

**Tabel 10. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Ijazah Tertinggi dan Wilayah**

KRT	Kelompok Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan (%)						
	Tidak pernah sekolah	Tidak punya ijazah	Paket A/ SDLB/ SD/ MI	Paket B/ SMPLB / SMP/ MTs	Paket C/ SMLB/ SMA/ MA/ SMK	D1-S3	Total
Perkotaan	6,75	18,23	34,57	16,20	20,81	3,45	100
Perdesaan	13,17	21,71	39,61	11,61	12,17	1,74	100
Perkotaan + Perdesaan	10,55	20,29	37,55	13,48	15,70	2,43	100

Jika dilihat dari tingkat pendidikan Kepala Rumah Tangga penduduk miskin Jawa Timur dengan pendidikan setara SD yang ditamatkan menempati persentase tertinggi yaitu 37,55 persen. Persentase tertinggi kedua adalah penduduk miskin yang kepala rumah tangganya tidak punya ijazah SD sebesar 20,29 persen. Persentase tertinggi ketiga adalah penduduk miskin yang pendidikan kepala rumah tangganya setara SMA sebesar 15,70 persen. Artinya penduduk miskin Jawa Timur yang kepala rumah tangganya berpendidikan rendah mencapai 68,39 persen dan sekitar 31,61 persen kepala rumah tangga penduduk miskin yang pendidikannya setara SMP keatas.

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga penduduk miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki karakteristik yang hampir mirip. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga penduduk miskin wilayah perkotaan yang berpendidikan rendah mencapai 59,55 persen dan 40,45 persen yang pendidikannya setara SMP keatas. Sedangkan, di wilayah perdesaan tingkat pendidikan kepala rumah tangga penduduk miskin yang berpendidikan rendah mencapai 74,49 persen dan hanya 25,51 persen yang pendidikannya setara SMP keatas.

**Tabel 11. Persentase Penduduk Miskin Usia > 5 Tahun Menurut Ijazah Tertinggi dan Wilayah**

ART	Kelompok Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan (%)						
	Tidak pernah sekolah	Tidak punya ijazah	Paket A/SDLB/SD/MI	Paket B/SMPLB/SMP/MTs	Paket C/SMLB/SMA/MA/SMK	D1-S3	Total
Perkotaan	9,25	24,40	27,43	18,10	18,45	2,38	100
Perdesaan	12,16	24,83	31,95	16,42	12,76	1,88	100
Perkotaan + Perdesaan	10,98	24,65	30,11	17,10	15,07	2,08	100

Demikian pula karakteristik pendidikan anggota rumah tangga penduduk miskin Jawa Timur, kondisinya hampir sama dengan kondisi kepala rumah tangga penduduk miskin Jawa Timur. Penduduk miskin Jawa Timur yang anggota rumah tangganya

berpendidikan rendah mencapai 65,74 persen dan hanya 34,26 persen saja anggota rumah tangga miskin yang pendidikannya setara SMP keatas.

Bila dilihat lebih mendalam lagi tingkat pendidikan Anggota Rumah Tangga penduduk miskin di Jawa Timur berdasarkan wilayah terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tingkat pendidikan Anggota Rumah Tangga penduduk miskin di Jawa Timur di wilayah perkotaan sedikit lebih baik dibandingkan wilayah perdesaan. Anggota Rumah Tangga yang berpendidikan rendah di wilayah perkotaan sebesar 61,08 persen dan yang berpendidikan setara SMP keatas sebesar 38,92 persen. Sementara itu, anggota rumah tangga wilayah perdesaan yang berpendidikan rendah sebesar 68,94 persen dan yang berpendidikan setara SMP keatas sebesar 31,06 persen.

### **3. Karakteristik Kesehatan Penduduk Miskin Jawa Timur 2023**

Karakteristik penduduk miskin yang perlu diperdalam berikutnya adalah terkait kesehatan penduduk miskin yang meliputi penduduk miskin yang mengalami gangguan kesehatan, pengobatan penduduk miskin yang mengalami gangguan kesehatan, dan kepemilikan asuransi kesehatan penduduk miskin.

Penduduk miskin Jawa Timur yang mempunyai keluhan kesehatan sebesar 24,61 persen dimana dari angka tersebut penduduk yang keluhan kesehatannya mengganggu kegiatan sehari-hari sebesar 42,89 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah penduduk miskin perkotaan Jawa Timur yang mempunyai keluhan kesehatan sedikit lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan yaitu 26,36 persen berbanding 23,42. Demikian juga keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk miskin perkotaan diderita oleh 43,44 persen, sedangkan penduduk miskin perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari sebesar 42,47 persen.

**Tabel 12. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Keluhan Kesehatan dan Wilayah**

ART	Mempunyai Keluhan Kesehatan (%)			Keluhan Kesehatan Mengganggu Kegiatan Sehari-hari (%)		
	Ya	Tidak	Total	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	26,36	73,64	100,00	43,44	56,56	100,00
Perdesaan	23,42	76,58	100,00	42,47	57,53	100,00
Perkotaan + Perdesaan	24,61	75,39	100,00	42,89	57,11	100,00

**Tabel 13. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Pengobatan Keluhan Kesehatan dan Wilayah**

ART	Mengobati Sendiri (%)			Berobat Jalan (%)		
	Ya	Tidak	Total	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	83,91	16,09	100,00	35,18	64,82	100,00
Perdesaan	84,62	15,38	100,00	29,69	70,31	100,00
Perkotaan + Perdesaan	84,31	15,69	100,00	32,08	67,92	100,00

Terkait keluhan kesehatan penduduk miskin Jawa Timur, pengobatan terhadap keluhan kesehatan menjadi masalah tersendiri, karena tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan baik pengobatan secara mandiri maupun berobat jalan. Penduduk miskin yang pernah mengobati sendiri terhadap keluhan kesehatannya sebesar 84,31 persen. Sedangkan penduduk yang pernah berobat jalan dalam rangka penyembuhan keluhan kesehatan sebesar 32,08 persen.

**Tabel 14. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Alasan Tidak Berobat Jalan dan Wilayah**

ART	Alasan Tidak Berobat Jalan (%)						
	Tidak punya biaya berobat/transport	Tidak ada sarana transport	Waktu tunggu pelayanan lama	Mengobati sendiri	Tidak ada yang mendampingi	Merasa tidak perlu	Lainnya
Perkotaan	0,67	0,73	0,05	75,35	0,00	21,83	1,37
Perdesaan	0,93	0,00	0,11	65,31	0,53	31,15	1,97
Perkotaan + Perdesaan	0,82	0,30	0,08	69,48	0,31	27,28	1,72

Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, karakteristik penduduk miskin terkait pengobatan terhadap keluhan kesehatan sangat mirip atau tidak jauh berbeda, baik dilihat dari cara pengobatan secara mandiri maupun dengan berobat jalan. Alasan penduduk miskin tidak berobat jalan ada bermacam-macam, namun sebagian besar merasa bisa mengobati sendiri (69,48 persen) dan merasa tidak perlu (27,28 persen). Alasan lainnya seperti tidak punya biaya berobat/transport, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, tidak ada yang mendampingi dan lain-lain.

**Tabel 15. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Wilayah**

ART	Tidak Punya Jaminan Kesehatan (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	35,34	64,66	100,00
Perdesaan	43,92	56,08	100,00
Perkotaan + Perdesaan	40,43	59,57	100,00

Keengganan penduduk miskin untuk melakukan berobat jalan dimungkinkan berkaitan dengan kepemilikan jaminan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan penduduk miskin Jawa Timur sebesar 59,57 persen. Sementara itu, penduduk di wilayah perkotaan persentasenya lebih banyak dibandingkan penduduk miskin perdesaan yaitu sebesar 64,66 persen untuk wilayah perkotaan berbanding 56,08 persen untuk wilayah perdesaan.

**Tabel 16. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Tempat Melahirkan Anak Terakhir dan Wilayah**

ART	Tempat Melahirkan Anak Terakhir (%)				
	Fasilitas Kesehatan *)	Praktek nakes	Polindes/ Poskesdes	Rumah	Lainnya
Perkotaan	70,69	15,78	12,33	0,00	1,20
Perdesaan	65,26	13,61	12,58	8,32	0,23
Perkotaan + Perdesaan	67,50	14,51	12,47	4,89	0,63

Fasilitas Kesehatan \*): RS Pemerintah/Swasta/RSIA, Rumah bersalin/klinik, Puskesmas, dan Pustu

Penanganan kelahiran bayi oleh fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan menjadi penting dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan data Susenas 2023 untuk Jawa Timur penanganan kelahiran oleh fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan sudah cukup baik namun masih ada penduduk miskin yang melahirkan dirumah atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan.

Penduduk miskin di Jawa Timur yang belum memanfaatkan fasilitas kesehatan/ tenaga kesehatan dalam melahirkan anak masih ada 5,52 persen. Jika kita perdalam lagi, penduduk miskin yang masih banyak belum memanfaatkan fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan berada pada wilayah perdesaan yaitu sebesar 8,55 persen. Sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan hanya 1,20 persen yang belum memanfaatkan fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan dalam melahirkan anak.

**Tabel 17. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Penggunaan Alat KB/cara Tradisional dan Wilayah**

ART	Pernah/sedang Menggunakan Alat KB/ Cara Tradisional (%)		
	Ya, pernah	Ya, sedang	Tidak
Perkotaan	19,96	54,99	25,06
Perdesaan	17,54	62,21	20,24
Perkotaan + Perdesaan	18,49	59,39	22,13

Selain penanganan pada saat melahirkan bayi, Angka Kematian Ibu (AKI) dapat disebabkan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang, sehingga perempuan melahirkan terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, atau terlalu tua. Program Keluarga Berencana menjadi penting dalam rangka mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) bagi masyarakat Jawa Timur terutama pada penduduk miskin.

Salah satu cara melihat keberlanjutan program Keluarga Berencana adalah dengan melihat kuantitas penduduk yang menggunakan alat KB/cara tradisional. Penduduk miskin Jawa Timur yang tidak pernah mengikuti program KB sebesar 22,13 persen. Angka tersebut tidak jauh berbeda pada penduduk miskin untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan yaitu sebesar 25,06 persen dan 20,24 persen yang tidak pernah menggunakan alat KB/cara tradisional.

#### **4. Karakteristik Perumahan Penduduk Miskin Jawa Timur 2023**

Perumahan merupakan salah satu komoditi penyumbang garis kemiskinan non makanan yang cukup signifikan. Kondisi perumahan rumah tangga miskin Jawa Timur terkait status

kepemilikan bangunan tempat tinggal masih relatif bagus dimana sekitar 91,52 persen merupakan milik sendiri, 7,24 persen dengan status bebas sewa, dan 0,26 persen dengan status rumah dinas. Sementara rumah tangga miskin yang tempat tinggalnya kontrak/sewa hanya 0,86 persen.

**Tabel 18. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Wilayah**

Rumah Tangga	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati (%)				
	Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas	Total
Perkotaan	90,78	2,61	6,41	0,21	100,00
Perdesaan	96,41	0,04	3,54	0,00	100,00
Perkotaan + Perdesaan	94,11	1,09	4,71	0,09	100,00

Kondisi status kepemilikan bangunan tempat tinggal rumah tangga miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan sedikit berbeda. Perbedaannya adalah rumah tangga miskin perdesaan yang menempati rumah sendiri persentasenya lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin perkotaan yaitu 96,41 persen berbanding 90,78 persen. Sebaliknya, rumah tangga miskin perkotaan yang menempati rumah kontrak/sewa persentasenya lebih besar dari pada wilayah perdesaan yaitu 2,61 persen berbanding 0,04 persen.

**Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Fasilitas Tempat BAB, Pengguna, dan Wilayah**

Rumah Tangga	Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan yang Menggunakan (%)				
	Ada, digunakan hanya ART sendiri	Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu	Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan	Ada, ART tidak menggunakan	Tidak ada fasilitas
Perkotaan	76,15	12,12	1,63	0,32	9,78
Perdesaan	74,88	11,48	1,56	0,33	11,76
Perkotaan + Perdesaan	75,40	11,74	1,59	0,32	10,95

Berikutnya terkait kondisi sanitasi yaitu fasilitas tempat BAB di rumah tangga miskin di Jawa Timur. Sebanyak 75,40 persen rumah tangga miskin sudah menggunakan fasilitas BAB sendiri. Namun, masih ada sebanyak 11,28 persen rumah tangga miskin yang tidak menggunakan fasilitas BAB karena tidak memiliki fasilitas tersebut maupun yang sudah memilikinya.

Fasilitas tempat BAB rumah tangga miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi pada wilayah perkotaan, rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dan digunakan hanya ART sendiri persentasenya jauh lebih besar dibanding rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dengan besaran 76,15 persen berbanding 74,88

persen. Begitu juga rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas tempat BAB dan digunakan bersama ART rumah tangga tertentu persentasenya lebih besar dibanding rumah tangga miskin di wilayah perdesaan dengan besaran 12,12 persen berbanding 11,48 persen. Secara umum, fasilitas tempat BAB rumah tangga miskin di wilayah perkotaan masih lebih baik dibandingkan rumah tangga miskin di wilayah perdesaan, dimana rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB sebesar 9,78 persen, sedangkan rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB sebesar 11,76 persen.

**Tabel 20. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Wilayah**

Rumah Tangga	Tempat Pembuangan Akhir Tinja (%)				
	Tangki septik	IPAL	Kolam/sawah/sungai/danau/laut	Lubang tanah	Pantai/tanah lapang/kebun
Perkotaan	81,12	0,98	5,30	12,60	0,00
Perdesaan	59,15	0,98	3,85	35,77	0,25
Perkotaan + Perdesaan	68,20	0,98	4,45	26,22	0,15

Rumah tangga miskin di Jawa Timur yang memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB tidak seluruhnya menggunakan tangki septik atau IPAL untuk tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga miskin yang tidak menggunakan tangki septik atau IPAL untuk tempat pembuangan akhir tinja sebanyak 30,82 persen, sedangkan yang sudah menggunakan tangki septik atau IPAL untuk tempat pembuangan akhir tinja sebanyak 69,18 persen.

Kondisi sanitasi terkait tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga miskin di wilayah perkotaan Jawa Timur lebih baik dari rumah tangga miskin di wilayah perdesaan. Rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang menggunakan tangki septik atau IPAL untuk tempat pembuangan akhir tinja sebanyak 82,10 persen, sedangkan rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang sudah menggunakan tangki septik atau IPAL untuk tempat pembuangan akhir tinja sebanyak 17,90 persen.

**Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Air Minum dan Wilayah**

Rumah Tangga	Sumber Air Minum (%)				
	Air bersih*)	Sumur/ mata air tak terlindung	Air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi)	Air hujan	Lainnya
Perkotaan	68,67	2,43	0,00	0,00	28,90
Perdesaan	69,24	6,26	0,35	0,05	24,10
Perkotaan + Perdesaan	69,01	4,70	0,20	0,03	26,06

Air Bersih\*): air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur dan mata air terlindung yang berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan limbah/kotoran terdekat.

Permasalahan terkait sanitasi rumah tangga miskin yang lain adalah sumber air minum. Sumber air minum yang dikonsumsi oleh rumah tangga miskin Jawa Timur sebagian besar sudah menggunakan air bersih yaitu sebesar 69,01 persen. Air bersih yang digunakan bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sedangkan rumah tangga miskin yang belum menggunakan air bersih sebagai sumber air minum masih ada 5,04 persen.

Akses terhadap akses air bersih sebagai sumber air minum rumah tangga miskin masih terdapat perbedaan di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang bisa mengakses air bersih sebagai sumber air minum sebesar 93,16 persen. Sedangkan rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang bisa mengakses air bersih sebagai sumber air minum sebesar 97,57 persen.

**Tabel 22. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Air untuk Memasak/Mandi/Cuci dan Wilayah**

Rumah Tangga	Sumber Air untuk Memasak/Mandi/Cuci (%)			
	Leding	Sumur	Mata Air	Lainnya
Perkotaan	11,65	73,84	11,73	2,78
Perdesaan	11,98	54,29	29,25	4,48
Perkotaan + Perdesaan	11,84	62,27	22,10	3,78

Sebagian besar rumah tangga miskin di Jawa Timur memanfaatkan sumur untuk memasak/mandi/cuci. Sebesar 62,27 persen rumah tangga miskin yang memanfaatkan sumur. Jika di rinci menurut wilayah, rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang lebih banyak memanfaatkan sumur dibandingkan rumah tangga miskin di wilayah perdesaan. Rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang memanfaatkan sumur sebesar 73,84

persen, sedangkan rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang memanfaatkan sumbu sebesar 54,29 persen.

**Tabel 23. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Penerangan dan Wilayah**

Rumah Tangga	Sumber Utama Penerangan (%)		
	Listrik PLN Meteran	Listrik PLN Tanpa Meteran	Bukan Listrik
Perkotaan	92,47	7,53	0,00
Perdesaan	91,22	8,74	0,03
Perkotaan + Perdesaan	91,73	8,25	0,02

Selain air bersih, kebutuhan akan energi listrik untuk perumahan di rumah tangga miskin juga tidak kalah penting. Akses rumah tangga miskin Jawa Timur terhadap listrik sudah baik atau hampir seluruh rumah tangga miskin sudah mengakses listrik. Hanya sedikit sekali rumah tangga miskin yang belum bisa mengakses listrik baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan yaitu hanya sebesar 0,02 persen. Tidak ada rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang belum bisa mengakses listrik. Sementara itu, masih ada rumah tangga miskin di perdesaan yang belum bisa mengakses listrik sebesar 0,03 persen.

Hal menarik terkait akses listrik dari rumah tangga miskin Jawa Timur adalah masih banyak rumah tangga miskin yang

mengakses listrik untuk penerangan menggunakan listrik PLN tanpa meteran yaitu sebesar 8,25 persen. Komposisi antar wilayah perkotaan dan perdesaan juga berbeda dimana rumah tangga miskin di perkotaan yang mengakses listrik PLN tanpa meteran lebih sedikit dari pada rumah tangga miskin di perdesaan yaitu 7,53 persen untuk wilayah perkotaan dan 8,74 persen untuk wilayah perdesaan.

**Tabel 24. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Wilayah**

Rumah Tangga	Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak (%)				
	Listrik	Elpiji	Gas kota, Biogas	Minyak tanah, Briket, dan Arang	Kayu Bakar
Perkotaan	0,20	80,67	0,72	0,15	18,26
Perdesaan	0,06	62,78	0,00	0,13	37,03
Perkotaan + Perdesaan	0,12	70,07	0,29	0,14	29,39

Penggunaan bahan bakar untuk memasak pada rumah tangga miskin Jawa Timur memiliki karakteristik yang menarik. Pengguna bahan bakar elpiji dan kayu bakar untuk memasak merupakan paling dominan, dimana pengguna elpiji sebesar 70,07 persen dan pengguna kayu bakar sebesar 29,39 persen. Bila dilihat per wilayah penggunaan bahan bakar untuk memasak penduduk miskin Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda. Penduduk miskin di

wilayah perkotaan sebagian besar menggunakan elpiji yaitu sebesar 80,67 persen, sedangkan yang masih menggunakan kayu bakar sebesar 18,26 persen. Sementara penduduk miskin di wilayah perdesaan yang menggunakan elpiji yaitu sebesar 62,78 persen, sedangkan yang menggunakan kayu bakar sebesar 37,03 persen.

## **5. Akses terhadap Jaminan Sosial Penduduk Miskin Jawa Timur 2023**

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Meskipun demikian tidak semua penduduk miskin Jawa Timur mendapat bantuan sosial tersebut seperti yang tersaji pada data berikut ini.

**Tabel 25. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Wilayah**

Rumah Tangga	Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	32,98	67,02	100,00
Perdesaan	36,67	63,33	100,00
Perkotaan + Perdesaan	35,16	64,84	100,00

Salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan beras sejahtera. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023 penduduk miskin Jawa Timur yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 35,16 persen. Hal ini berarti masih banyak penduduk miskin yang belum mendapat BPNT dari pemerintah. Jika dirinci per wilayah terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin wilayah perkotaan yang mendapat BPNT sebesar 32,98 persen. Sedangkan penduduk miskin wilayah perdesaan yang mendapat BPNT sebesar 36,67 persen.

Program Bantuan Pangan Non Tunai disebut BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/

pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

**Tabel 26. Persentase Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Wilayah**

Rumah Tangga	Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	99,01	0,99	100,00
Perdesaan	90,28	9,72	100,00
Perkotaan + Perdesaan	92,43	7,57	100,00

Jaminan sosial dari pemerintah yang berupa BPNT sebagian besar dimanfaatkan masyarakat miskin di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu sebesar 92,43 persen. Terdapat hal yang menarik pada pemanfaatan BPNT pada wilayah perkotaan dan perdesaan. Rumah tangga miskin di wilayah kota lebih memanfaatkan BPNT untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yaitu sekitar 99,01 persen untuk wilayah perkotaan dibandingkan 90,28 persen di wilayah perdesaan.

**Tabel 27. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Program PBI dan Wilayah**

ART	Penerima Bantuan Iuran (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	51,33	48,67	100,00
Perdesaan	47,58	52,42	100,00
Perkotaan + Perdesaan	49,11	50,89	100,00

Selain jaminan pangan pemerintah pusat juga memberikan jaminan kesehatan pada penduduk yang kurang mampu berupa asuransi kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS PBI. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Penduduk miskin Jawa Timur yang mendapatkan jaminan kesehatan berupa PBI sebesar 49,11 persen. Penduduk miskin yang mendapat bantuan PBI wilayah perkotaan lebih besar dari penduduk miskin yang berada di perdesaan, dengan perbandingan 51,33 persen untuk wilayah perkotaan dan 47,58 persen untuk wilayah perdesaan.

**Tabel 28. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Program PBI dan Wilayah**

ART	Penerima Jamkesda (%)		
	Ya	Tidak	Total
Perkotaan	9,93	90,07	100,00
Perdesaan	7,38	92,62	100,00
Perkotaan + Perdesaan	8,42	91,58	100,00

Selain pemerintah pusat sudah memberikan jaminan kesehatan, pemerintah daerah juga memberikan jaminan kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya jangkau jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Penduduk miskin yang tidak mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah pusat akan mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.

Penduduk miskin Jawa Timur yang mendapatkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar 8,42 persen. Penduduk miskin yang mendapat bantuan Jamkesda di wilayah perdesaan lebih kecil dari penduduk miskin yang berada di perkotaan dengan perbandingan 7,38 persen untuk wilayah perdesaan dan 8,42 persen untuk wilayah perkotaan.

## 6. Karakteristik Konsumsi Rumah Tangga Miskin Jawa Timur 2023

**Tabel 29. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan, Rata-rata Konsumsi Kalori, dan Rata-rata Konsumsi Protein**

ART	Perkapita		
	Pengeluaran untuk Makanan (%)	Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal)	Rata-rata Konsumsi Protein
Penduduk Miskin	63,11	1.577,06	42,80

Pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memiliki karakteristik tersendiri. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan mencapai 63,11 persen terhadap pengeluaran untuk mencukupi seluruh kebutuhan sehari-hari. Meskipun sebagian besar pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan pangan namun kalori yang dihasilkan masih dibawah kebutuhan kalori ideal yaitu minimal 2100 kkalori perhari. Rata-rata konsumsi kalori penduduk miskin Jawa Timur hanya mengonsumsi 1.577,06 kkal/perhari/perkapita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2003. *Metodologi dan Profil Kemiskinan Tahun 2002*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2022*. Surabaya: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. “Sekilas Pandang Nomor Induk Kependudukan”. Pembaruan Terakhir 2019. <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/sekilas-pandang-nomor-induk-kependudukan>
- Hamonangan Ritonga dan Friedhelm Betke. 2002. *Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat yang Spesifik Daerah dan Sayang Budaya*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hasbullah, Jousairi. 2012. *Tangguh dengan Statistik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Haughton & Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC: The World Bank.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kementerian Sosial RI. 2012. *Pedoman Umum Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Literasi Publik. “Literasi Baca-Tulis Sebagai Kecakapan Hidup”.  
Pembaruan terakhir 20 April 2012.  
<https://www.literasipublik.com/literasi-baca-tulis>
- Ravallion, Martin. 1998. *Poverty Lines in Theory and Practice: Living Standards Measurement Study*. LSMS Working Paper: 133
- Thee, Kian Wie. 1981. *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak. 2013. *Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)*. Jakarta: Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Penghitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.





**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Dapat Di Kolaborasi

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292

Telp: (031) 8439343 Fax: (031) 8494007, 8471143

Homepage: <https://jatim.bps.go.id> E-mail: [bps3500@bps.go.id](mailto:bps3500@bps.go.id)